

Analysis of the Use of E-Purchasing with Local Catalogs on the Performance of the Central Maluku Regency Government

Ismail*, Erly Leiwakabessy, Maryam Sangadji, & Fahrudin Ramly

Pattimura University, Jl. Ir. M. Putuhena – Kampus Poka, Ambon, 97233, Indonesia

Abstract

E-purchasing is a method of procurement of goods and services whose process resembles the online shopping system that is rife today such as lazada.com, bukalapak.com, elevenia.com, and others. E-purchasing complements the method of procurement of government goods and services which previously consisted of general auction/selection, limited auction/selection, simple auction, direct appointment, direct procurement, contest and contest. This study aims to determine the effect of efficiency, effectiveness and transparency on the performance of procurement of goods through local catalogs. The population of this study are Procurement Officials, Commitment Making Officials in the Central Maluku Kabuapten Government, and local catalog users in Central Maluku Regency, as well as Goods/Services Providers involved in local catalogs. The sample was determined by purposive sampling technique, as many as 110 respondents. The analysis method used is the Structural Equation Model (SEM). The research variables are 4 latent variables consisting of 3 independent variables each efficiency, effectiveness and transparency and 1 (one) dependent variable namely performance. The results showed that efficiency, effectiveness and transparency had a positive and significant effect on the performance of procurement of goods through local catalogs.

Keywords: local catalogs, e-purchasing, performance of procurement

1. Pendahuluan

Program pemerintah dalam peningkatan daya saing perekonomian nasional, menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu sektor yang ditekankan dalam perpres ini adalah kecepatan dan penyederhanaan proses pengadaan dengan optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengadaan pemerintah juga menawarkan sebuah solusi bagaimana prinsip dasar pengadaan yang transparan, akuntabel dan berintegritas dapat dijaga (Wittig, 2003 dan Callender & Schapper, 2003 dalam Vaidya dkk., 2006).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang pelaksanaan kinerja pengadaan barang/jasa secara nasional baru dimulai tahun 2008. Pengembangan *e-Procurement* di Indonesia dimulai dengan melahirkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang digunakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan lelang. . E-Procurement kini telah melayani e-Tendering, e-Purchasing dan katalog dimana layanan tersebut juga telah dilengkapi tahapan proses dan berbagai fitur pendukung sebagaimana fungsi e-Procurement sebagai end-to-end solution proses pengadaan (Vaidya dkk., 2006).

E-purchasing adalah inovasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi ketiga masalah di atas. E-purchasing merupakan metode pengadaan barang dan jasa yang prosesnya menyerupai sistem belanja online yang marak pada saat ini seperti lazada.com, bukalapak.com, elevenia.com, dan lain-lain. E-purchasing melengkapi metode pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya terdiri dari pelelangan/seleksi umum, pelelangan/seleksi terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes dan sayembara.

Manfaat e-purchasing sendiri sebagaimana dilaporkan UKPBJ Maluku Tengah sudah dirasakan berbagai stake holder, sehingga transaksi pengadaan barang dengan menggunakan e-purchasing mengalami peningkatan sejak diluncurkannya sistem ini kepada public seperti terlihat pada Tabel berikut.

* Corresponding author.

E-mail address: mail.masohi@gmail.com

Tabel 1. Transaksi Katalog Lokal

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023 Per Juni
1	Transaksi Katoalog Lokal	Rp. 393.385.000	Rp. 750.543.000

Sumber: Sumber data monev katalogl kpp: <https://redash-katalog.lkpp.go.id/public/dashboards>.

Berdasarkan data tabel 1 terlihat di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, belanja pengadaan barang melalui katalog lokal mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terdapat 6 transaksi produk dengan nilai transaksi sebesar Rp.393.385.000,- Tahun 2023 mengalami peningkatan dengan 27 transaksi produk dan nilai transaksi sebesar Rp.792.987.500,-. Data ini menggambarkan bahwa penggunaan katalog mempermudah stakeholder dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan pengadaan barang/jasanya dapat terlaksana berdasarkan prinsip kinerja pengadaan. Konsep kinerja pengadaan didefinisikan sebagai buah hasil transparansi, efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengadaan (Expert Group Meeting, 2001, Garan, 2005 dalam Rotich dan Okello. 2015).

Penelitian tentang penggunaan katalog lokal dalam pengadaan barang/jasa di Maluku Tengah masih sangat terbatas. Sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang melihat implementasi penerapan kinerja pengadaan melalui katalog lokal. Tetapi penelitian tentang hal ini sudah pernah dilakukan diberbagai daerah seperti Damayanti, dkk (2012), Retnowulan, (2014), Taufik, dkk, (2016), Hadianito, A. W., (2022)

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori E-Government

Menurut Bank Dunia (2001), *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area Network, internet dan mobile computing, dimana keseluruhannya memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang *e-Government*, Ilham (2013) memberikan kesimpulan bahwa *e-Government* tidak terpaku pada unsur “e” saja, tetapi yang terpenting adalah proses dan jalannya pemerintahan melalui fasilitas internet atau media *online*.

2.2. Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Teknologi Informasi

Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan definisi tersendiri terkait dengan pengadaan barang/jasa di Indonesia terdiri dari (Setiyono, 2012) :

- 1). Kebijakan pengadaan, struktur organisasi pengadaan (pengadaan oleh lembaga terpusat atau pengadaan oleh masing-masing unit)
- 2). Proses pengadaan mulai dari otorisasi pengadaan, persiapan kontrak, administrasi kontrak dan lain-lain.
- 3). Metode pengadaan.
- 4). Teknik pengadaan.
- 5). Profesionalisme pengadaan dan *workforce*

2.3. E-Procurement

E-Procurement adalah pnggunaan metode elektronik dengan internet untuk menjalankan fungsi pengadaan yang meliputi kegiatan identifikasi persyaratan, proses pengadaan, pembayaran dan manajemen kontrak (Corsi, 2006). Negara-negara di dunia mempertimbangkan menggunakan *e-Procurement* dalam sistem mereka untuk menunjang kinerja. *E-Procurement* merupakan bisnis ke bisnis atau bisnis ke konsumen, pembeli dan penjual dari penyedia barang dan jasa dengan internet dan sistem lain seperti *Electronic Data Imerchange* (EDO Sistem. Jadi merupakan aplikasi pembelian barang dan jasa melalui jaringan elektronik atau elektronik data pertukaran (Kurnia, dkk, 2023). Atau merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet) untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, adil dan transparan (Aprelly dan Herumanta, 2014). Impelentasi e-procurement terbukti meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa dilingkup Kementerian Keuangan (Aryati dan Pangaribuan (2019)

2.4. E-Purchasing

Metode e-purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi. Sistem e-purchasing di Indonesia dapat diakses melalui laman www.katalog.lkpp.go.id. Alur proses e-purchasing dengan katalog lokal. E-purchasing merupakan pembelian barang secara elektronik (Dama, dkk, 2020). Hasil penelitian Mangkono, dkk (2018) menemukan pengaruh e-purchasing terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif dan transparat.

2.5. Kinerja Pengadaan

Konsep kinerja pengadaan telah ada sejak tahun 1030-an. Para ilmuwan mendefinisikan kinerja pengadaan sebagai buah hasil transparansi, efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengadaan (Expert Group Meeting, 2001, Garan, 2005 dalam Rotich dan Okello. 2015). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan indikator atas kinerja pengadaan barang/jasa sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Penjelasan terkait dengan indikator pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1). Efisien:

Efisien berarti Pengadaan Barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Lebih lanjut, Silalahi (2013) mengungkapkan bahwa dari sudut pandang pemerintah (LKPP), konsep efisiensi diterjemahkan sebagai:

- a. Efisiensi proses, berupa pengurangan biaya.
- b. Efisiensi harga, yakni seberapa dekat harga yang ditawarkan terhadap harga pasar.

Menurut Keban (2008) dalam Silalahi (2013) parameter utama yang seringkali digunakan dalam kriteria efisiensi adalah biaya, waktu, tenaga dan energi yang dikeluarkan di dalam proses dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Sehingga efisiensi ini memberikan efek bagi organisasi yaitu berupa rantai prosedur yang lebih sederhana dan singkat serta pengurangan biaya administrasi (Gardenal. 2010 dalam Silalahi 2013)

2). Efektif:

Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan efektivitas pelayanan pemerintah, yaitu:

- a. Kemudahan dalam pemakaian. Pelayanan publik oleh birokrasi secara komputerisasi bersifat mudah dimengerti dan dapat digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji coba sistem beberapa kali untuk menghindari kesalahan.
- b. Infrastruktur. Tersedia infrastruktur yang cukup sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan, dan juga tersedia alternatif yang cukup untuk mengakses internet.
- c. Sementara itu, Amirullah (2015) mengatakan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran- sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Efektivitas penekanannya pada pengerjaan sesuatu secara benar (doing the right things) yang diarahkan kepada pencapaian tujuan organisasi.

3). Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya (Perpres 16 Tahun 2018). Untuk mewujudkan transparansi, sebagaimana tertuang dalam dokumen *APEC Procurement Transparency Standards in Indonesia*, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Publikasi dan akses terhadap peraturan yang mengatur ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 2). Publikasi rancangan regulasi dan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.
- 3). Akses terhadap informasi dan undangan untuk ikut serta dalam pengadaan.
- 4). Perlakuan yang setara antar peserta lelang.
- 5). Persyaratan untuk mempublikasikan informasi mengenai kriteria evaluasi dan putusan penetapan pemenang.
- 6). Ketersediaan mekanisme review untuk keputusan yang lelang dan penyelesaian sengketa/sanggahan secara cepat

dan adil (tidak memihak).

7). While submitting an article, authors will be asked to Transfer Intellectual Property Rights and Exploitation Rights.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah dengan objek penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan transaksi pengadaan barang melalui katalog lokal. Populasi pada penelitian ini adalah Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan pengguna Katalog Elektronik di Kabupaten Maluku Tengah, serta Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam Katalog Elektronik. Sampel dipilih sebanyak 110 dengan teknik purposive sampling.

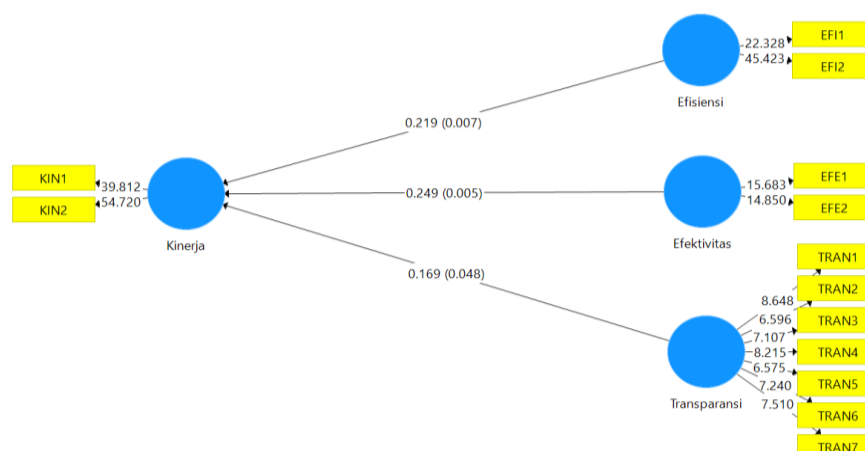
Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM) yang terdiri dari 4 variabel laten yang terdiri dari 3 variabel independen masing-masing efisiensi, efektivitas dan transparansi dan 1 variabel dependen yaitu kinerja. Definisi operasional masing-masing variable terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Variabel dan Indikatornya

No	Variabel	Indikator
1	Efisiensi	a. Total biaya yang dikeluarkan selama lelang menjadi lebih murah. Kode: EFI ₁ b. Penghematan bahan-bahan material (kertas, tinta dll). Kode: EFI ₂
2	Efektivitas	a. Pengiriman barang/jasa sesuai dengan lokasi pengiriman dan tepat waktu. Kode: EFE ₁ b. E-Purchasing memberikan peluang kepada pelaksana untuk dapat memilih penyedia barang/jasa yang sesuai. EFE ₂
3	Transparansi	a. Semua penyedia mendapatkan informasi dan perlakuan yang sama. Kode: TRAN ₁ b. Detil spesifikasi, harga dan kontrak tersaji dengan jelas. Kode: TRAN ₂ c. Media untuk menghubungi penyedia telah disediakan. Kode: TRAN ₃ d. Pengumuman lelang/pengadaan dipublikasikan secara terbuka. Kode: TRAN ₄ e. Semua informasi terkait dengan e-Purchasing disediakan dan dapat diakses oleh user/pengguna dan penyedia. Kode: TRAN ₅ f. Tersedia alamat dan nomor telephone secara lengkap. Kode: TRAN ₆ g. Profil dan data penyedia disajikan secara lengkap dan dapat diakses secara online. Kode: TRAN ₇
	Kinerja	a. Pemusatan manajemen dan kontrol pengadaan menjadi lebih baik. Kode: KIN ₁ b. Standarisasi proses dan dokumen pengadaan. Kode: KIN ₂

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Skema Model Partial Least Square (PLS) – Data Awal



Gambar 1. Skema Model Partial Least Square (PLS) – Data Awal

Penggabungan seluruh komponen SEM menjadi suatu model lengkap dari model pengukuran dan model structural digambarkan dalam diagram alur (path diagram) untuk mempermudah melihat hubungan-hubungan fungsional yang ingin diuji seperti terlihat pada gambar 1.

4.2. Uji Validitas Indikator

Untuk menguji validitas indikator, digunakan nilai outer loading atau loading factor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi kriteria atau kategori baik apabila nilai outer loading $> 0,7$, seperti terlihat pada tabe 3. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari total 13 indikator dalam penelitian ini seluruhnya memiliki nilai outer loading $> 0,7$ dengan nilai berkisar 0,830 sampai 0,950 maka dapat diartikan 13 indikator tersebut memiliki korelasi yang baik dengan konstruknya atau seluruh indikator dapat dikatakan valid karena telah memenuhi syarat validitas indikator.

Tabel 3. Uji Validitas Indikator

Efisiensi	Efektivitas	Transparansi	Kinerja
EF1 = 0,926	EFE1 = 0,894	TRAN1 = 0,913 TRAN4 = 0,872	KIN1 = 0,914
EF2 = 0,950	EFE2 = 0,891	TRAN2 = 0,861 TRAN5 = 0,830	KIN2 = 0,933
		TRAN3 = 0,865 TRAN6 = 0,845	
		TRAN7 = 0,873	

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

4.3. Uji Realibitas Internal

Menurut Ghozali, suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila nilai composite reliability $> 0,6$ dan memenuhi cronbach's alpha apabila nilai cronbach's alpha $> 0,7$.

Tabel 4. Uji Reliabilitas Internal

Variabel	Cronbsch's Alpha	Composite Reability	Keterangan
Efisiensi	0,746	0,887	Reliabel
Efektivitas	0,864	0,939	Reliabel
Transparansi	0,828	0,920	Reliabel
Kinerja	0,946	0,954	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang baik. Selanjutnya akan diuji validitas konvergen seperti terlihat pada table 5.

Tabel 5. Nilai AVE

Variabel	Average Variance Extracted	Keterangan
Efisiensi	0,880	Reliabel
Efektivitas	0,797	Reliabel
Transparansi	0,750	Reliabel
Kinerja	0,850	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa nilai AVE pada seluruh variabel lebih besar dari 0,5 dengan nilai berkisar 0,750 sampai 0,880. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki covergent validity yang baik.

4.4. Uji Validitas Diskriminan

Uji ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variable lainnya. Hal ini terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Uji Validitas Diskriminan

Indikator	Efisiensi	Efektivitas	Transparansi	Kinerja
EFI1	0,926	0,191	0,072	0,236
EFI2	0,950	0,160	0,077	0,284
EFE1	0,167	0,894	0,151	0,291
EFE2	0,164	0,891	0,220	0,288
TRAN1	0,125	0,194	0,913	0,290
TRAN2	0,039	0,082	0,861	0,086
TRAN3	0,065	0,185	0,865	0,165
TRAN4	0,029	0,232	0,872	0,228
TRAN5	-0,007	0,098	0,830	0,097
TRAN6	-0,022	0,197	0,845	0,188
TRAN7	0,165	0,173	0,873	0,223
KIN1	0,222	0,274	0,239	0,914
KIN2	0,289	0,322	0,203	0,933

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pada nilai cross loading yang dicetak tebal memiliki nilai paling tinggi pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai pada variabel lainnya dengan nilai cross loading lebih dari 0,7 yaitu berkisar 0,830 sampai 0,950.

4.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kinerja	0,887	0,656

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Pada variabel Kinerja yang dipengaruhi variabel Efisiensi, Efektivitas, dan Transparansi didapatkan nilai R-Square Adjusted sebesar 0,656. Hal ini menjelaskan bahwa presentase besarnya variabel prediktor yaitu Efisiensi, Efektivitas, dan Transparansi dapat menjelaskan Kinerja sebesar 65,6%. Sedangkan sisanya, yaitu 34,4% dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian ini.

4.6. Q-Square (Predictive Relevance)

Tabel 8. Q-Square (Predictive Relevance)

Variabel	SS0	SSE	Q ² (=1-SSE/SS0)
Efektivitas	200,000	110,557	0,447
Efisien	200,000	95,342	0,523
Kinerja	200,000	106,359	0,468
Transparansi	700,000	238,865	0,659

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan output pada Tabel 8, didapatkan nilai Q2 sebesar 0,447 pada variabel Efektivitas, nilai Q2 sebesar 0,523 pada variabel Efisiensi, nilai Q2 sebesar 0,468 pada variabel Kinerja, dan nilai Q2 sebesar 0,659 pada variabel

Transparansi. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena nilai Q2 yang didapatkan adalah lebih besar dari 0.

4.7. F-Square (Effect Size)

Tabel 9. F-Square (Effect Size)

Variabel	Kinerja
Efektivitas	0,170
Efisien	0,157
Transparansi	0,133

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

- Pada pengaruh Efektivitas terhadap Kinerja, didapatkan nilai F2 sebesar 0,170 dimana berada diantara 0,15 sampai 0,35 yang artinya secara statistic pengaruh Efektivitas terhadap Kinerja memiliki efek pengaruh yang moderat.
- Pada pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja, didapatkan nilai F2 sebesar 0,157 dimana berada diantara 0,15 sampai 0,35 yang artinya secara statistic pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja memiliki efek pengaruh yang moderat.
- Pada pengaruh Transparansi terhadap Kinerja, didapatkan nilai F2 sebesar 0,133 dimana berada diantara 0,02 sampai 0,15 yang artinya secara statistic pengaruh Transparansi terhadap Kinerja memiliki efek pengaruh yang lemah.

4.8. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dimana hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistics > T tabel. Hasilnya disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Uji Hipotesis

Path	Koefisien	P Values	Keterangan
Efisiensi -> Kinerja	0,219	0,007	Signifikan
Efektivitas -> Kinerja	0,249	0,005	Signifikan
Transparansi -> Kinerja	0,169	0,048	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024

- Efisiensi terhadap Kinerja
Didapatkan nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,219. dan nilai P-value 0,007 dimana lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H0 tolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan Efisiensi terhadap Kinerja..
- Efektivitas terhadap Kinerja
Didapatkan nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,249 dan nilai P-value 0,005 dimana lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H0 tolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan Efektivitas terhadap Kinerja..
- Transparansi terhadap Kinerja

Didapatkan nilai koefisien jalur bernilai positif sebesar 0,169 dan nilai P-value 0,048 dimana lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H0 tolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan Transparansi terhadap Kinerja.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variable independent yaitu efisiensi, efektivitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa. Ini berarti peningkatan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa maka akan meningkatkan kinerja.

References

- Amirullah. 2015. *Pengantar Managemen: Fungsi – Proses – Pengendalian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Aryati, T dan Pangaribuan, L., 2019., Analisis Pengaruh Implementasi e- Procurement dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan barang dan Jasa Kementerian Keuangan, *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 4, No. 1, 19 – 24.
- Corsi, M. 2006. *E-Procurement Overview*. Universitas “La Sapienza” di Roma
- Dama, Y, dkk, 2020, Pengaruh Implementasi e-Purchasing, Akses Pasar dan Persaingan Bisnis Terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Studi Empirik Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara), *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 21, No. 3, 96 – 116.
- Damayanti, dkk, 2012, Penerapan e-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 139 – 146
- Ghozali, I., 2013, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*, Edisi 7, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilham, Hall. A. M., 2013. *Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dengan e-Procurement di Kabupaten Kuantan Senggigi*. Tesis Tidak Dipublikasikan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*.
- Hadianto, A.W., 2022, Dampak Pengguna e-Procurement, Akuntabilitas, Kompetensi dan Kompensasi dan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Prosiding Seminar Nasional Nasional UNIMUS*, Vol.5, 267 – 278.
- Kurnia, dkk, 2023, Pengaruh e-procurement Terhadap Keinerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud, *Fluralis: Faletahan Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, 51 – 60.
- Mangkona, dkk, 2018, Pengaruh Penerapan e-tendering dan e-purchasing Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, *Sigma: Journal of Economic and Business*, Vol. 1, No. 1, 72 – 77.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
- Retnowulan, 2014, *Pengaruh Implementasi Elektronik Procurement (E-Proc) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Perwujudan Goord Governance di Balai Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarang*, Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Rotich, G. K., & Okello, B. 2015. Analysis of use of e-procurement on performance of the procurement functions of county governments in Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, Vol. III, Issue 6, June 2015. United Kingdom.
- Setiyono, B. 2012. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Cetakan I. Bandung: Nuansa
- Silalahi, A. L. 2013. *Evaluasi atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Dilihat dari Perspektif Prinsip-Prinsip Pengadaan*. Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Taufik, dkk, 2016., Pengaruh Penenarapan e-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Implikasinya Terhadap Penyerapan Modal (Studi Pada Satuan Kerja Lingkup Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh), *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5, No. 1, 10 – 20.
- Vaidya, K., Sajeev, A. S. M., & Callender, G. 2006. Critical factors that influence e-procurement implementation success in the public sector. *Journal of Public Procurement*, Vol. 6, No. 1, 70 – 99.